



Veronica Dela Rosa¹
Dinda Fadhila²
Nathasya Salsabilla³
Ridho Satria Tangguh
Anwar⁴
Muhammad Randa⁵

PERAN GENERASI Z DALAM PEMILU YANG BERSIH DAN DEMOKRATIS

Abstrak

Dalam era digital yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, peran generasi milenial dan Gen Z dalam konteks politik dan pemilihan umum menjadi semakin penting. Meskipun mayoritas dari mereka aktif menggunakan media sosial sebagai platform utama untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi, mereka juga dihadapkan pada tantangan seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Namun, partisipasi aktif mereka dalam pengawasan pemilu dapat memperkuat integritas dan keadilan dalam proses pemilihan. Pengalaman praktis menunjukkan bahwa kehadiran dan peran mereka dalam pengawasan pemilu memiliki dampak positif dalam mengurangi kecurangan dan memperkuat demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan peran dan kesadaran generasi Z dalam politik dapat menjadi kunci untuk menciptakan pemilihan umum yang bersih, inklusif, dan demokratis di masa depan.

Kata Kunci: Generasi Z; Pemilihan Umum; Pengawasan Pemilu

Abstract

In a digital age influenced by technological advancements, the role of millennials and Gen Z in the context of politics and elections is becoming increasingly important. Although the majority of them actively use social media as the main platform to communicate and get information, they are also faced with challenges such as the spread of hoaxes and hate speech. However, their active participation in election surveillance can strengthen integrity and fairness in the electoral process. Practical experience shows that their presence and role in election surveillance has a positive impact in reducing fraud and strengthening democracy as a whole. Therefore, increasing the role and awareness of generation Z in politics can be the key to creating clean, inclusive, and democratic elections in the future.

Keywords: Generasi Z; Election; Election Supervision

PENDAHULUAN

Generasi milenial dan Gen Z, yang kini sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, menampilkan penguasaan yang luar biasa dalam bidang tersebut. Keterampilan teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun demikian, pengakuan akan peran penting teknologi dalam kehidupan generasi ini masih belum sepenuhnya merata. Saat ini, pemerintah mulai memberikan perhatian serius terhadap kedua generasi ini, memberikan dorongan dan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam lembaga-lembaga publik. Langkah ini diharapkan dapat mendorong partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan demokratis negara.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Indonesia dinyatakan sebagai negara demokratis. Salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi ini adalah melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang mengutamakan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun, dalam pelaksanaan

^{1,2,3,4,5}Ilmu Hukum,Fakultas Hukum,Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
 email: veronicadela23@gmail.com, dindafadhila03@gmail.com, nathasyasalsabilla4@gmail.com, ridhosatriatnggh1802@gmail.com, muhammadrand9@gmail.com

sistem pemilihan umum di Indonesia, masih terdapat tantangan besar karena minimnya partisipasi generasi muda dalam mendukung kesuksesan pemilihan umum tersebut.

Dalam konteks saat ini, usia tersebut mengacu pada Generasi Z, yang merupakan kelompok yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Pada pemilihan umum tahun 2024, Generasi Z bersama dengan generasi milenial membentuk 60% dari total kelompok pemilih. Berdasarkan survei, hanya 4,86% Generasi Z yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum tahun 2019. Namun, hal ini tidak boleh diabaikan begitu saja. Jika isu mengenai golput dipengaruhi oleh narasi negatif atau manipulatif, tidak menutup kemungkinan bahwa tingkat golput dapat meningkat dan menguntungkan kepentingan politik dari pihak tertentu.

Di samping masalah teknis, ketidakpuasan masyarakat umum dan kaum muda terhadap calon pemimpin yang cenderung memprioritaskan kepentingan elit politik daripada kepentingan rakyat menjadi penyebab umum dari golongan putih. Selain evaluasi terhadap kinerja calon, kurangnya pemahaman kaum muda tentang pendidikan politik dan pemilu juga menjadi faktor penting. Pendidikan politik dan pemilu sebenarnya bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Pendidikan politik aktif juga dianggap penting agar masyarakat, terutama kaum muda, memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan peran dan fungsi mereka sebagai warga negara. Pendidikan pemilihan umum bagi masyarakat dan kaum muda dapat memperluas demokrasi yang bertanggung jawab, berbeda dengan generasi sebelumnya yang cenderung hanya memperhatikan kepentingan individu tanpa memperhatikan kepentingan umum dan kondisi sosio-ekonomi yang rentan.

Pendidikan politik bagi generasi millennial dan Gen Z perlu dikembangkan secara inovatif agar dapat menghidupkan minat mereka dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan lebih bermakna. Mengingat kedua generasi ini telah tumbuh dan terbiasa dengan perkembangan teknologi, keterlibatan mereka dalam diskusi politik melalui berbagai platform media sosial dapat memberikan akses kepada mereka untuk memahami isu-isu politik yang relevan, termasuk tahapan pemilu serentak pada tahun 2024.

Pendidikan pemilihan umum memiliki keterkaitan yang erat dengan pemilih pemula, yang merupakan target utama bagi partai politik untuk mendapatkan dukungan mereka. Pemilih pemula adalah mereka yang berusia antara 17 hingga 21 tahun, yang baru pertama kali memiliki hak pilih mereka dan umumnya lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Mereka seringkali belum memahami secara menyeluruh tentang partai politik dan rentan menjadi sasaran empuk bagi upaya pendekatan politik untuk mendapatkan dukungan tambahan dalam pemilihan umum.

Selain itu, menghadapi perubahan dalam dunia politik, diperlukan kehadiran orang-orang yang lebih muda, terutama mereka yang berasal dari generasi milenial dan Gen Z, yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang beragam lapisan masyarakat. Mereka dapat menjadi agen perubahan untuk menembus hegemoni yang telah dibangun oleh kepentingan politik dari masa lalu yang mendominasi arena politik. Generasi Z memiliki potensi besar untuk mengubah paradigma tersebut. Dengan kekuatan yang mereka miliki, tidaklah mengherankan jika generasi Z akan menjadi sasaran utama dari upaya pemasaran oleh setiap tim kampanye dalam pemilu yang akan datang.

Namun, di balik potensi tersebut, penting bagi generasi Z untuk terus mengasah pemahaman mereka tentang politik. Hal ini bertujuan agar mereka tidak hanya dimanfaatkan oleh peserta pemilu untuk memperoleh dukungan semata.

Situasi ini sering membuat media sosial menjadi tempat persaingan terkait isu dan konten politik secara daring. Polarisasi di antara kelompok pemilih semakin meningkat karena adanya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bersaing dalam Pemilihan Presiden, yang memicu pertempuran konten antara pendukung kubu di platform media sosial. Berbagai segmen masyarakat yang sebelumnya kurang tertarik pada pembahasan politik tiba-tiba menjadi sangat responsif terhadap setiap isu politik yang muncul di media sosial, terutama jika isu tersebut terkait dengan calon yang mereka dukung. Dukungan yang diberikan kepada masing-masing calon terlihat telah mencapai aspek emosional dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan hukum, menegaskan pentingnya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang mendasarkan pada prinsip kebenaran dan keadilan. Sayangnya, media daring sering kali dieksploitasi sebagai alat politik yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks ini, penggunaan alat bukti menjadi penting dalam menegakkan hak dan

kewajiban individu sebagai anggota masyarakat. Pemahaman akan hal ini mendorong gagasan pembentukan alat bukti untuk menjaga hak-hak individu dalam interaksi mereka dengan orang lain.

Hukum mengatur segala interaksi antara individu dengan kelompok, masyarakat, dan pemerintah. Sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat, sistem hukum hadir dengan norma-norma yang mengatur perilaku. Menjamin keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum memerlukan tindakan hati-hati sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hukum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama, sehingga konflik dapat dihindari.

Penelitian telah membuktikan bahwa media sosial menjadi salah satu sarana yang efektif dalam menyebarkan informasi yang tidak benar. Bahkan, informasi palsu cenderung menyebar lebih cepat daripada informasi yang valid di platform media sosial. Selain itu, terdapat jutaan akun bot otomatis yang menggunakan profil palsu dan anonim untuk membanjiri media daring, bahkan dapat mengelabui alat deteksi spam yang ada di platform tersebut.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang mengarahkan penelitian pada aplikasi prinsip-prinsip atau norma-norma yang terdapat dalam hukum yang berlaku. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, sementara analisis kajian menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam. Dalam proses ini, peneliti menggali berbagai sumber hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan terkait untuk memahami landasan hukum yang relevan. Kemudian, data yang ditemukan dianalisis secara kritis dengan memperhatikan konteks hukum dan implikasi normatifnya. Sebagai hasilnya, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu hukum yang diteliti dan kontribusi terhadap pemikiran hukum secara umum. Top of Form

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Teknologi Informasi Modern Terhadap Pemilu Pada Generasi Z

Generasi yang lahir di era digital, akses internet telah menjadi kebutuhan esensial bagi Gen Z. Jika lima tahun lalu Warnet menjadi tempat utama bagi anak-anak (81%) dan remaja (56%) untuk mengakses internet, saat ini rumah telah menggantikan peran Warnet, dengan 49% anak-anak dan 62% remaja mengakses internet dari rumah mereka. Persentase ini mengalami peningkatan signifikan dari 7% pada anak-anak dan 9% pada remaja. Sebanyak 93% anak-anak dan 97% remaja menyatakan bahwa mereka mengakses internet melalui perangkat mobile mereka seperti smartphone atau iPad.

Generasi Z memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum, mengingat mereka telah menjadi salah satu kelompok dominan dalam populasi saat ini. Penilaian yang dibuat oleh Gen-Z terhadap calon presiden dapat berdampak signifikan terhadap citra calon tersebut di kalangan mereka. Gen-Z dikenal memiliki ciri khas dan nilai-nilai yang berbeda dengan generasi sebelumnya, sehingga pendekatan mereka terhadap berbagai strategi manajemen citra calon presiden perlu dipahami secara mendalam. Analisis yang komprehensif diperlukan untuk memahami pandangan dan pendapat yang dipegang oleh kelompok Gen-Z terhadap setiap calon presiden.

Kehadiran generasi milenial dan Z sebagai mayoritas pengguna media sosial seharusnya membuat partai politik sadar akan hal ini untuk pemilu 2024 terutama melalui perkembangan teknologi informasi, telah menyebabkan perubahan dalam dinamika sosial masyarakat. Ini tercermin dalam peningkatan konflik sosial yang berkaitan dengan isu SARA dan primordialisme yang semakin kuat, serta munculnya persoalan etika dan moral di tengah masyarakat. Kepedulian sosial di kalangan pelajar juga mulai menurun karena dominasi individualisme, dengan preferensi untuk berkomunikasi melalui platform virtual daripada secara langsung.

Demikianlah, dengan meningkatnya tensi politik dan risiko ujaran kebencian di media sosial menjelang pemilu 2024, terutama dengan penggunaan informasi untuk memperkuat polarisasi dan memicu konflik antar lawan politik, perlu dipahami bahwa mayoritas pengguna media sosial adalah kaum remaja, atau Generasi Z.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan pemerintah sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang sesuai dengan

kepentingan bersama. Media online dapat berperan sebagai jembatan yang efektif bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan mengekspresikan partisipasi politik mereka.

Namun, disayangkan bahwa tingkat ketergantungan yang dialami oleh remaja Generasi Z, terutama di Indonesia, dinilai sebagai yang paling kurang sopan di Asia Tenggara. Perilaku kurang sopan yang terjadi di media sosial termasuk menyebarkan hoaks, melakukan penipuan, mengeluarkan ujaran kebencian, dan melakukan diskriminasi Top of Form

Yang paling krusial dalam politik adalah adanya inklusivitas yang mempromosikan kesatuan sehingga tidak menghasilkan konflik, baik itu konflik horizontal maupun vertikal. Keheterogenan politik dalam suatu negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, kita tidak boleh membiarkan perbedaan politik mengganggu persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Top of Form

Globalisasi, terutama dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang tak terbendung, telah membawa dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Perubahan ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sosial, mulai dari meningkatnya konflik sosial berbasis SARA dan primordialisme hingga munculnya dilema etika dan moral. Selain itu, sikap kepedulian sosial di kalangan pelajar menunjukkan penurunan karena dominasi individualisme, dengan preferensi untuk berkomunikasi melalui platform virtual dibandingkan dengan interaksi langsung dalam kehidupan nyata. Penggunaan waktu yang berlebihan pada aplikasi permainan dan media sosial di smartphone juga menonjol.

Idealnya, perangkat teknologi informasi seperti smartphone seharusnya dimanfaatkan oleh pelajar sebagai alat untuk pendidikan, memperluas pengetahuan dalam pembelajaran, mengembangkan minat dan bakat, serta membangun hubungan sosial yang positif dengan sesama pelajar dan masyarakat umum.

Mengangkat Peran Generasi Z dalam Mewujudkan Pemilu yang Bersih

Hampir semua negara modern saat ini secara resmi mengakui prinsip kedaulatan rakyat. Mereka menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari kehendak rakyat dan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Prinsip ini menjadi dasar konsep demokrasi. Meskipun secara formal demokrasi menjadi sesuatu yang diidamkan di setiap negara, implementasinya bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya.

Inti dari Demokrasi adalah pengakuan bahwa masyarakat yang berkembang adalah mereka yang membina lingkungan di mana kebebasan berekspresi tidak hanya diterima dengan baik tetapi juga dirayakan. Melalui aliran informasi dan gagasan yang tidak terbatas, kebebasan berekspresi menjadi pondasi masyarakat demokratis, mendorong kemajuan sosial, memacu inovasi, dan memastikan bahwa suara setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau keyakinan mereka, dihargai dan didengar.

Perkembangan kebebasan berekspresi telah mengalami transformasi yang signifikan dalam konteks sejarah pemerintahan di Indonesia. Pada masa Orde Lama (1945-1965) dan Orde Baru (1966-1998), kebebasan berekspresi dibatasi dan dikendalikan oleh pemerintah pusat untuk digunakan sebagai alat kontrol dan kekuasaan. Situasi ini tidak mencerminkan esensi negara demokratis, karena adanya campur tangan dan pembatasan langsung dari pemerintah pusat yang menghambat warga untuk menyuarakan aspirasi dan pendapat mereka. Seiring dengan evolusi tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman, era baru ruang publik pun muncul, yang dipengaruhi secara signifikan oleh kemunculan media sosial. Pada periode ini, kebebasan berekspresi menjadi hak fundamental yang memainkan peran kunci dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Di Indonesia sendiri partisipasi masyarakat dalam bidang politik mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 1998, dengan bertambahnya variabel-variabel baru yang mempengaruhinya. Hal ini tercermin dari peningkatan antusiasme masyarakat serta meningkatnya kualitas partai politik yang muncul dalam lembaga pemilu.

Meningkatnya tingkat partisipasi memerlukan kontribusi dari semua pihak terkait. Semua komponen harus turut serta secara merata, dan kerjasama lintas sektor sangat diperlukan sebagai pondasi demokrasi pemilihan. Selain lembaga penyelenggara pemilu, seluruh masyarakat, peserta pemilu, pengamat pemilu, dan organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat aktif dalam menyosialisasikan proses dan tahapan pemilu, sehingga masyarakat umum, terutama para pemilih, dapat terlibat secara aktif dalam setiap tahap pemilu.

Tidak terlalu berbeda dengan hal tersebut, tingkah laku politik dari generasi Z di Indonesia, yang kini mencakup sekitar 27,94% dari keseluruhan populasi, juga layak dibahas.

Di era digital saat ini, peran media sosial sebagai alat komunikasi politik telah menjadi sangat penting. Pemilihan umum di Indonesia semakin mengakui signifikansi media sosial sebagai sarana kampanye yang efektif. Oleh karena itu, pasangan calon (paslon) secara umum cenderung memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk merancang dan menyajikan strategi kampanye yang inovatif.

Keterlibatan yang aktif dari Generasi Milenial dan Gen Z dalam proses pemilihan umum akan menjadi fondasi yang kuat dalam menjaga integritas dan kekuatan demokrasi di Indonesia. Dengan menggunakan hak suara mereka, mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi arah politik negara dan memilih pemimpin yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan mereka sebagai generasi. Melalui partisipasi politik yang proaktif, mereka dapat mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi landasan dari sistem pemerintahan negara ini.

Partisipasi Gen Z juga telah terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pemilihan umum. Dalam konteks ini, pemahaman bahwa kontribusi aktif Gen Z dalam pengawasan pemilu dapat secara signifikan dapat menciptakan pemilu yang bersih. Melalui partisipasi dalam pemantauan, sosialisasi, edukasi pemilih, dan advokasi, Gen Z dapat memainkan peran krusial dalam menjaga integritas dan keadilan pemilihan. Pengalaman praktis menunjukkan bahwa kehadiran dan peran Gen Z dalam pengawasan pemilu memiliki dampak positif dalam mengurangi kecurangan dalam proses pemilu, serta memperkuat demokrasi secara keseluruhan.

Jumlah pemilih dari generasi Y dan Z akan menjadi faktor penting pada Pemilu 2024 berdasarkan hasil survei yang diterbitkan oleh BPS dalam Statistik Indonesia 2022. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk dalam kelompok usia 25-44 tahun pada tahun 2021 adalah sekitar 85.520 jiwa, yang setara dengan sekitar 31% dari total jumlah penduduk Indonesia. Kelompok usia ini umumnya diklasifikasikan sebagai generasi Y.

Selain itu, dalam publikasi yang sama, jumlah penduduk dalam kelompok usia 15-24 tahun mencapai sekitar 44.777 jiwa, yang merupakan sekitar 16% dari total penduduk Indonesia. Sesuai dengan definisi rentang tahun kelahiran yang digunakan oleh beberapa peneliti, kelompok usia ini termasuk dalam generasi Z. Jika jumlah pemilih dari kedua generasi ini digabungkan, maka secara keseluruhan, generasi Y dan Z menyumbang sekitar 47% dari total jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021. Angka ini memiliki signifikansi yang besar jika dilihat dari persentase jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan ditetapkan oleh KPU RI.

Peran aktif Gen-Z dalam Pengawasan partisipatif memberikan kontribusi penting dalam pemilu. Keterlibatan mereka memperkuat akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan partisipasi dalam proses pemilu, serta memperkuat mekanisme demokrasi. Selain itu, kehadiran mereka juga meningkatkan kepercayaan terhadap hasil pemilu dan membantu menjaga perdamaian serta stabilitas.

SIMPULAN

Dalam era digital dan kemajuan teknologi saat ini, peran Generasi Z dalam konteks politik dan pemilihan umum menjadi semakin penting. Dengan mayoritas Generasi Z yang aktif menggunakan media sosial sebagai platform utama untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi, mereka memiliki potensi besar dalam mempengaruhi dinamika politik dan transparansi dalam proses pemilihan umum.

Namun, sementara teknologi memberikan kesempatan untuk terlibat dalam diskusi politik dan kampanye, Generasi Z juga dihadapkan pada tantangan, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kurangnya kesopanan dalam interaksi online. Meskipun demikian, partisipasi aktif Generasi Z dalam pengawasan pemilu, baik melalui pemantauan, sosialisasi, edukasi pemilih, maupun advokasi, dapat memperkuat integritas dan keadilan dalam proses pemilihan.

Pengalaman praktis menunjukkan bahwa kehadiran dan peran Generasi Z dalam pengawasan pemilu memiliki dampak positif dalam mengurangi kecurangan dalam proses pemilu, serta memperkuat demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan peran dan kesadaran Generasi Z dalam politik dapat menjadi kunci untuk menciptakan pemilihan umum yang bersih, inklusif, dan demokratis di masa depan.

Generasi milenial dan Gen Z memiliki peran yang semakin penting dalam konteks politik, terutama dengan adanya kemajuan teknologi yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Pemerintah mulai memberikan perhatian serius terhadap kedua generasi ini untuk mendorong

partisipasi aktif dalam lembaga-lembaga publik. Meskipun Indonesia secara resmi diakui sebagai negara demokratis, tantangan besar terjadi dalam sistem pemilihan umum karena minimnya partisipasi generasi muda.

Generasi Z, yang merupakan kelompok dominan dalam populasi saat ini, memiliki peran kunci dalam proses pemilihan umum. Pendidikan politik dan pemilu menjadi penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama kaum muda, tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Keterlibatan aktif dari generasi milenial dan Gen Z diharapkan dapat memperluas demokrasi yang bertanggung jawab. Peran media sosial dalam politik semakin penting, terutama dalam memengaruhi pandangan dan perilaku politik generasi muda. Dengan demikian, menjaga integritas, transparansi, dan inklusivitas dalam penggunaan media sosial dalam konteks politik menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga demokrasi yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli Ramadhani,dkk. (2015). *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*. Jakarta Selatan: Perludem.
- Mohammad Syaiful Aris. (2021). *Hukum Pemilu: Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum dalam UUD NRI 1945*. Jakarta Timur: Kelompok Intrans Publishing.
- Agata Fanny Pakpahan,Dkk. (2024). "Pengaruh FoMO (Fear of Missing Out) dalam Perspektif Gen Z terhadap Pesta Demokrasi 2024". *Jurnal Pendidikan Berkarakter*, Vol. 2 No. 1.
- Alifya Rahil Ramadhina Miskal,Dkk. (2023). "Etika Gen Z dalam Menyampaikan Preferensi Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024 di Sosial Media". *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*,Vol. 1 No. 5.
- Al Musa Karim,dkk.(2020). "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Media Sosial (Studi Deskriptif Tingkat Dan Pola Politik Partisipatif Gen-Z Kota Yogyakarta Melalui Pemanfaatan Aplikasi Instagram Tahun 2019)".*Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*,Vol. 3, No. 2.
- Amir,dkk. (2023). "Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik GEN-Z Pada Pemilu Legislatif Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019". *Jurnal Lanskap Politik*, Vol. 1 No. 3.
- Anang Sujoko,Dkk. (2023). "Literasi Media Digital bagi Gen-Z di MAN 1 Kota Malang". *Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 8 No. 4.
- Charlie Thyawarta, dkk. (2024). "Studi Kasus Pertanggungjawabn Hukum Notaris DalaPembuatan Akta Otentik Ditinjau Dari Prinsip Kehati Hatian". *Jurnal Review hukuPendidikan dan Pengajaran*, Vol 7 No 1.
- Daniel Budiman Prayogo, dkk. (2023). "Strategi Impression Management Calon Presiden 2024 dalam Tayangan "3 Bacapres Bicara Gagasan" di Kanal YouTube Najwa Shihab Menurut Masyarakat Gen-Z di Surabaya. *Jurnal Scriptura*, Vol. 13, No. 2.
- Erna Wahyuningish,dkk. (2022). "Dampak Teknologi Informasi Dan Pentingnya Protokol Bagi Anak-Anak". *Jurnal Abdimas Perbanas*, Vol. 3 No. 1.
- Herwin Sagita Bela,dkk. (2023). "Peran Pemuda Dalam Menyukkseskan Pemilu Di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupatn Ogan Komering Ulu". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 4.
- Iwan Setiawan,Dkk. (2024). "Pancasila Sebagai Landasan Gen Z dalam Mempertahankan Nilai Persatuan Pada Era Globalisasi". *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 9 No. 1.
- Marisa Nabila, dkk. (2023). "Studi Literatur : Tantangan Dalam Menengakkan Hukum Keadilan Di Indonesoa". *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol 7 No 1.
- Moh Anton Suryadi. (2023). "Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil". *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 3 No. 1.
- Nadya Hapsari Thrisianingsih Sukandar,Dkk. (2024). "Strategi Komunikasi Paslon Prabowo Gibran dalam Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Gen Z dan Milenial dalam Pemilu 2024". *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 2 No. 1.
- Nina Andriana. (2022). "Pandangan Partai Politik Terhadap Media Sosial Sebagai Salah Satu Alat komunikasi Politik Untuk Mendekati Pemilih Muda (Gen Y Dan Gen Z) : Studi Kasus PDI-P Dan PSI". *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 19 No.1.
- Nuryadi Kadir. (2022). "Media Sosial dan Politik Partisipatif : Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z". *Jurnal Resiprokal*, Vol. 4 No. 2.

- Riska Sarofa. (2023). "Pengaruh Pendidikan Politik Gen Z Dan Millenial Terhadap Upaya Mewujudkan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Berintegritas". Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan, Vol. 9 No.
- Saleh Al Hamid,dkk, (2023). "Sosialisasi Literasi Politik dalam Menyongsong Pemilu 2024 Terhadap Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Bolangitang Timur". Jurnal Pengabdian Pedagogika, Vol. 1 No. 2.
- Satria Rizaldi Alchatib,dkk. (2021). "Penguatan Nilai Demokrasi Melalui Peran Gen Z Indonesia Dalam Media Online". Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, Vol. 4 No. 3.
- Zulharbi Amatahir. (2023). "Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu". Jurnal Media Hukum, Vol. 11 No.2.